

# PENERAPAN SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH KARYAWAN SESUAI HUKUM KETENAGAKERJAAN

Yana Sukma Permana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, Indonesia  
permana.raya73@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 30, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Application of Criminal Sanctions, Business Actors, Employment Law</p>	<p><i>Wages are the rights of workers or employees that are received and expressed in the form of money as compensation from entrepreneurs or employers to workers which are determined and paid according to work agreements or statutory regulations. There are criminal sanctions against companies that pay minimum wages. and minimum enforcement of criminal sanctions against companies that pay workers' wages below the minimum wage, enforcement of criminal labor sanctions against business actors who do not pay their workers' wages in accordance with labor law. Wages are a fundamental element in the employment relationship between workers and employers. In the context of labor law in Indonesia, employers are obliged to pay workers' wages in accordance with the provisions set by the government. This obligation is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment and strengthened through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Enforcement of criminal law sanctions in employment cases related to employee wages faces various complex obstacles. Even though there are strict legal instruments, as regulated in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, the application of criminal sanctions for companies that violate minimum wage provisions is still rare. These obstacles are not only caused by legal factors themselves, but also by other factors such as weak law enforcement, limited facilities and infrastructure, as well as the influence of culture and community structure. Overall, law enforcement is an effort to realize the values of justice and legal certainty.</i></p>

## Abstrak

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, adanya sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah minimum serta minimnya penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah buruh dibawah upah minimum, Penegakan sanksi pidana ketenagakerjaan terhadap pelaku usaha yang tidak membayar upah karyawan sesuai hukum ketenagakerjaan. Pengupahan merupakan elemen fundamental dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penegakan sanksi hukum pidana dalam kasus ketenagakerjaan terkait upah karyawan menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Meskipun telah ada perangkat hukum yang tegas, seperti yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, implementasi hukuman pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum masih jarang ditemui. Hambatan ini tidak hanya

disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti ketidakcukupan penegakan hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta pengaruh budaya dan struktur masyarakat. Secara keseluruhan, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku Usaha Yang, Hukum Ketenagakerjaan

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum harus menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang, termasuk bagi para tenaga kerja di Indonesia. Usaha negara untuk memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan bagi hak para pekerja di Indonesia. Jaminan perlindungan bagi pekerja di Indonesia dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pengaturan jaminan tersebut lebih jauh diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi, "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Salah satu wujud dari pelaksanaan pembangunan nasional adalah penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja. Kalau kita berbicara mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, maka penelaahannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai Sumber Daya Manusia, di masa Pembangunan Nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di negara kita Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, karena itu ia merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa (Djumadi, 2008).

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah secara sistemik dalam mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangat memprihatinkan (Sutendi, 2001).

Dalam konteks ketenagakerjaan, memang benar bahwa pekerja/buruh sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Oleh karena itu, sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia diharapkan melindungi hak-hak pekerja. Hal ini dipertegas melalui peraturan yang ada, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi atas pelanggaran pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar hak-hak atau ganti kerugian kepada pekerja/buruh. Hal ini memastikan bahwa hak pekerja tetap terlindungi meskipun terdapat pelanggaran. Salah satu sumber utama perselisihan antara pekerja dan pengusaha adalah terkait pengupahan. Sebelumnya, permasalahan seperti pengusaha yang tidak membayar upah lembur pada hari libur resmi, membayar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota, atau tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sering kali menjadi sumber konflik. Peraturan mengenai pengupahan ini kini juga mengalami perubahan dan penyesuaian dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam menentukan upah yang layak, maka terciptalah upah minimum sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi distribusi pendapatan. Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja, sepanjang ketentuan upah

didalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Jika ternyata ketentuan upah di dalam perjanjian kerja bertentangan dengan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah di dalam peraturan perundang-undangan (Budiono, 2009). Upah Minimum juga merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (Krishermono, 2015).

Selanjutnya, dari kedua pasal yang terdapat dalam pasal 91 dan pasal 95 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan tersebut setelah lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kemudian di gabungkan kedalam pasal 88A yang isinya :

- 1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja Antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusanya hubungan kerja.
- 2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- 3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/ buruh sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
- 7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
- 8) (8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.

Di dalam bentuk dan tata cara mengenai kewajiban pengusaha untuk membayar upah kepada pekerja juga sudah di tegaskan yaitu di dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan pada Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55. Selain itu juga kewajiban pengusaha di tegaskan pula apabila pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan upah pekerja yang sesuai pada pasal 88 A ayat (3) menurut Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Dengan adanya pengaturan pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka pengusaha tidak dapat memberikan upah secara sewenang-wenang terhadap pekerja/buruh dan langsung dapat dibatalkan demi hukum. Bahkan upah pekerja yang tidak di bayar oleh pengusaha itu harus wajib di bayarkan dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang ada serta sesuai dengan kesepakatan Kerja Bersama, tetapi perlu di ingat bahwa prinsip hukum pidana itu menganut asas ultimum remedium maka dengan inilah problematika terhadap pengaturan pidana di UU Cipta Kerja tersebut karena tidak seacara tegas di jelaskan di rumusan pasal terhadap pelaksanaan penerapan sanksi pidana, apakah upaya hukum melalui jalur pidana merupakan pilihan bagi

pekerja/buruh atau lebih mengutamakan upaya perselisihan hak melalui pengadilan hubungan industrial.

Menurut Pasal 136 UU No. 13 Tahun 2003 prosedur/sarana yang telah disediakan dalam menyelesaikan sengketa terutama mengenai hak/upah pekerja yaitu :

- 1) perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang

Maka dalam hal ini apabila pengusaha yang sengaja/ lalai tidak membayarkan upah pekerja termasuk kategori perselisihan hak sesuai dengan penjelasan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Akibat adanya perselisihan hak yaitu upah pekerja yang tidak di bayar oleh pengusaha menurut aturan Ketenagakerjaan menegaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Namun dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang- undang yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Untuk menjamin hak-hak pekerja dalam hal pengupahan, Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan beberapa perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan ini mencakup penegasan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat aturan, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja dapat terpenuhi.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengupahan merupakan salah satu upaya penting untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak pekerja. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan industrial, di mana pengusaha dan pekerja dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Membayar Upah Karyawan Sesuai Hukum Ketenagakerjaan?
2. Apasaja Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Sanksi Hukum Pidana Dalam Ketenagakerjaan Terkait Upah Karyawan?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk

menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini akan diteliti tentang aturan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Cipta Kerja untuk delik Pelaku Usaha Yang Tidak Membayar Upah Karyawan Sesuai Hukum Ketenagakerjaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu situasi, subjek, perilaku, atau fenomena yang terjadi saat ini (Sudjana & Ibrahim, 1989). Dengan penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperjelas sebuah situasi dalam permasalahan tertentu secara lengkap terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan data putusan pidana dalam delik Pelaku Usaha Yang Tidak Membayar Upah Karyawan Sesuai Hukum Ketenagakerjaan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari kepustakaan, seperti buku-buku, perundang-undangan, artikel, majalah atau bahan-bahan lain yang dapat digunakan untuk meneliti sebagai dasar penelitian, yang dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, UUD 1945, serta data putusan Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang maupun regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data kasus putusan yang berhubungan dalam penelitian ini, yang bersumber dari direktori putusan Mahkamah Agung.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Membayar Upah Karyawan Sesuai Hukum Ketenagakerjaan**

Pengupahan merupakan salah satu elemen fundamental dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, di mana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum (hukum publik) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan Negara yang berbeda dengan hukum privat yang hanya mengatur hubungan Antara perseorangan. Seseorang yang dapat dijatuhi sanksi pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali), sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", yang dalam hal ini adalah ketentuan pidana pasal 90 jo. pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 88 jo. Pasal 185 UU Cipta Kerja. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa seorang pengusaha dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang telah ditentukan oleh gubernur setempat setiap tahunnya.

Sanksi yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Dengan adanya ketentuan tersebut, seharusnya pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembayaran upah di bawah upah minimum ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembedaan. Hal ini diperkuat dengan sanksi pidana dalam delik pembayaran upah di bawah upah minimum yang di atur dalam Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang menerapkan sanksi pidana minimum khusus di dalam ketentuannya.

Karena pada dasarnya, para buruh telah dilindungi oleh negara dalam hal pembayaran upah yakni melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemberian upah oleh pengusaha di bawah upah minimum untuk para buruh melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89". Dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, berbunyi (Undang-Undang No 11 Tahun 2020: Tentang Cipta Kerja):

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Kini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 90 UU Ketenagakerjaan dihapuskan, dan diganti dengan Bab IV tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum" juncto Pasal 185 yang diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja berisi:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya, seperti contohnya penerapan pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi (Arief, 2008). Dengan adanya penerapan ini di ketentuan delik pembayaran upah di bawah upah minimum tersebut, dapat diartikan bahwa delik ini merupakan delik dengan bobot berat yang sangat merugikan pekerja dan masyarakat, yang mana seharusnya pemidanaan dalam delik ini harus lebih efektif.

Pemidanaan merupakan sebuah tahap untuk memberikan dan menetapkan sanksi pidana kepada seorang pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dalam hukum pidana. Kebijakan dari hukum pidana bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk pembuat undang-undang saja, namun juga untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Arief, 2008). Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial yang mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya

berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan” (Bambang Waluyo, 2004).

Pemidanaan memiliki tujuan yang merupakan salah satu peran penting dalam menjatuhkan sanksi pidana. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Prodjodikoro, 1980). Selain itu, tujuan pidana adalah kompleks, yang berarti bahwa bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) tapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi) (Moeljatno, 1985). Tujuan pemidanaan juga merupakan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, sama seperti unsur tindak pidana atau kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.

Terdapat beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori Absolut/Pembalasan

Teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menderita akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikan.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri (Muladi & Arief, 1984).

b. Teori Relatif/Maksud dan Tujuan

Dalam teori ini, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri dan bukan pembalasan. Jadi, teori ini menyadarkan bahwa hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan) (Muladi & Arief, 1984).

c. Teori Gabungan/Kombinasi

Dalam teori ini, dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relative yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Satochid Kartanegara, teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum (Kartanegara, 1998).

d. Teori Kontemporer

Sesungguhnya teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi (Hiariej, 2005).

1) Teori Efek Jera

Pemidanaan merupakan suatu sanksi yang salah satu tujuannya adalah memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Wayne R. Lafave menyebutkan

salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya (Hiariej, 2005).

2) Teori Edukasi

Teori Edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan buruk. Seneca yang merujuk kepada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi menjadi dosa (Hiariej, 2005).

Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama (Hiariej, 2005).. Hal ini memiliki arti bahwa pembedaan bukan dilakukan semata untuk memberi balasan atas perbuatannya, melainkan agar perbuatannya tersebut tidak diulangi

kembali dan tidak terjadi lagi perbuatan yang sama

3) Teori Rehabilitasi

Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Teori ini pada dasarnya disandarkan pada prevensi khusus (Hiariej, 2005)..

4) Teori Pengendali Sosial

Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku (Hiariej, 2005)..

5) Teori Keadilan Restoratif

Tujuan pidana menurut teori ini adalah memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut Hukum Pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Eglash, teori ini pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan caramelibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku (Hiariej, 2005).

Meskipun para buruh telah dilindungi dengan adanya ketentuan pidana dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, namun seringkali terjadi bahwa permasalahan pembayaran upah di bawah upah minimum ini diarahkan ke ranah perdata, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurut Khamid Istakhori (Sekjen Federasi Serbuk), desk pidana ketenagakerjaan yang ada di Polda Metro Jaya tidak berjalan sesuai harapan karena fungsinya sekedar konsultasi hukum. Bahkan, desk ketenagakerjaan ini malah membuat proses semakin panjang karena aparat biasanya meminta pelapor menunjukkan bukti baru jika ingin kasusnya berlanjut. Padahal pembuktian itu harus dicari dan ditelusuri oleh Polri, bukan dibebankan kepada buruh yang melapor. Seringkali aparat polisi berkilah kasus ini masuk dalam ranah perselisihan hubungan industrial, sehingga penyelesaiannya diarahkan melalui pengadilan hubungan industrial (PHI) (Thea, 2020). Padahal, aturan dan mekanisme dari hukum pidana untuk menanggulangi pembayaran upah di bawah upah minimum sudah jelas, apabila banyak kasus yang terbawa ke PHI, para pelaku akan menjalankan kewajibannya untuk membayar kekurangan upah kepada korban, sedangkan pembedaan ini sangat diperlukan dalam menanggulangi kasus pembayaran upah di bawah upah minimum yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembedaan untuk memberikan pelajaran dan pembinaan kepada pengusaha yang pada kenyataannya mampu untuk membayar upah pekerja berdasarkan upah minimum, namun tidak dijalankan (Nicholas & Adhari, 2021).

Sanksi pidana dalam ketenagakerjaan, terutama terkait dengan pelanggaran pengupahan, merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan pengupahan. Dengan adanya sanksi yang tegas dan pengawasan yang ketat, diharapkan kesejahteraan pekerja dapat lebih terjamin dan tercipta hubungan industrial yang lebih adil dan seimbang (Adiatma et al., 2022).

### **Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Sanksi Hukum Pidana Dalam Kasus Ketenagakerjaan Terkait Upah Karyawan**

Penegakan sanksi hukum pidana dalam kasus ketenagakerjaan terkait upah karyawan memerlukan upaya yang lebih serius dan konsisten dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri. Dengan berbagai hambatan yang dihadapi, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam UU Cipta Kerja, dapat ditegakkan secara efektif demi melindungi hak-hak pekerja.

Salah satu masalah aktual dalam bidang ketenagakerjaan saat ini adalah masalah pelaksanaan upah minimum. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi unjuk rasa atau mogok kerja oleh para pekerja yang umumnya menuntut adanya kenaikan upah atau peningkatan kesejahteraan mereka. Hal tersebut terjadi karena setiap perusahaan umumnya berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerjanya, dan sebaliknya pekerja ingin memperoleh upah yang sebesar-besarnya dari pengusaha sebagai balas jasa yang ia berikan. Sehingga antara pengusaha dan pekerja sering terjadi pertentangan, dimana masing-masing pihak berusaha memperjuangkan kepentingan masing-masing. Untuk menghindarkan pekerja dan pengusaha dari konflik berkepanjangan, **Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** telah mengatur mengenai upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota. Di dalam undang-undang ini telah dimuat secara tegas sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah di bawah Upah Minimum, yakni pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Namun disayangkan, walaupun telah ada perangkat hukum yang mengatur sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) penegakan sanksi pidananya masih jarang kita temui. Bahkan kasusnya pun jarang sampai pada tingkat peradilan pidana. Salah satu masalah aktual dalam bidang ketenagakerjaan saat ini adalah masalah pelaksanaan upah minimum. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi unjuk rasa atau pemogokan oleh para pekerja yang umumnya menuntut adanya kenaikan upah tau peningkatan kesejahteraan mereka. Hal tersebut terjadi karena setiap perusahaan umumnya berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerjanya, dan sebaliknya pekerja ingin memperoleh upah yang sebesar-besarnya dari pengusaha sebagai balas jasa yang ia berikan. Sehingga antara pengusaha dan pekerja sering terjadi pertentangan, dimana masing-masing pihak berusaha memperjuangkan kepentingan masing-masing. Minimnya penegakan sanksi pidana bagi perusahaan yang membayar upah di bawah UMK masih mengalami hambatan.

Esensi utama dibuatnya hukum adalah untuk memberikan keteraturan dan untuk itu hukum harus dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Ketika membicarakan pelaksanaan hukum, maka kita juga akan membicarakan penegakan hukum, sebagai bentuk lanjutan dari pelaksanaan hukum tersebut (Baringbing, 2011). Untuk kita harus pahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ideide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum (Tutik, 2006).

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Soekanto, 2008).

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali. Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia (Sunarto, 2004). Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Persoalan penegakan hukum pidana merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik ekonomi dan budaya masyarakat (Maroni, 2021). Selain itu, penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat (Hart, 2015). Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik merupakan penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama (Rahardjo, 2009). Namun demikian keberhasilan penegakan hukum sangat diharapkan, karena bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari "Negara berdasarkan atas hukum".

Berkaitan dengan hal diatas, Joseph Goldstein membagi wilayah penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu, total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana hanya sebatas actual enforcement, dikarenakan total enforcement yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif tidak mungkin dilakukan sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan (Maroni, 2021)..

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu (Dellyana, 1988):

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam

bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## KESIMPULAN

Pengupahan merupakan elemen fundamental dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pidana terhadap pelanggaran ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pekerja. Hukum pidana bertindak sebagai pranata sosial yang mengatur hubungan sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, pidana berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, pidana harus dijalankan secara efektif sesuai dengan tujuan hukum pidana, yang mencakup pembalasan, pencegahan, perbaikan, dan edukasi bagi masyarakat. Penegakan sanksi hukum pidana dalam kasus ketenagakerjaan terkait upah karyawan menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Meskipun telah ada perangkat hukum yang tegas, seperti yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, implementasi hukuman pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum masih jarang ditemui. Hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti ketidakcukupan penegakan hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta pengaruh budaya dan struktur masyarakat. Secara keseluruhan, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat luas. Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja, khususnya terkait upah, terlindungi dengan baik. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, sehingga penegakan hukum pidana dalam kasus ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkeadilan.

## REFERENSI

- Adiatma, P. R., Erliyani, R., Suprpto, & Yanova, M. H. (2022). Kepastian Hukum Tentang Pengaturan Penegakan Pidana Mengenai Kewajiban Membayar Upah Pekerja. *Badamai Law Journal*, 7(1), 134–149.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. (2004). *Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baringbing. (2011). *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi.
- Budiono, A. R. (2009). *Hukum Perburuhan*. PT Indeks.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Djumadi. (2008). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hart. (2015). *Mengenalinya Kedua Masyarakat Yang Mempunyai Cara-Cara Penegakan Hukumnya Sendiri-Sendiri Yaitu Primary Rules Of Obligation Dan Secondary Rules Og Obligation*. PT. Suryandaru Utama.
- Hiariej, E. O. (2005). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kartanegara, S. (1998). *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Krishermono, R. (2015). *Pengertian Upah Minimum, dari situs*. Jakarta: Kompas.
- Maroni. (2021). *Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan*. *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 4(1).
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.

- Muladi, & Arief, B. N. (1984). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Nicholas, J., & Adhari, A. (2021). Pemidanaan Terhadap Delik Pembayaran Upah Di Bawah Upah Minimum Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1088–1110.
- Prodjodikoro, W. (1980). Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Jakarta: PT Eresco.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (1989). Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru.
- Sunarto, S. (2004). Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutendi, A. (2001). Hukum Perburuhan, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thea, A. (2020). Mendorong Penguatan Instrumen Penegakan Pidana Ketenagakerjaan,. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penguatan-instrumen-penegakan-pidana-ketenagakerjaan-lt5f8953fc414ce/>
- Tutik, T. T. (2006). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Raya.